

IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Deskriptif di Kabupaten Jember)

Farikhatul Mardhiyah, Atik Rahmawati.

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: faricha73@gmail.com. Rahmadilli@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to describe and explain “Dialog Solutif” (solution-based dialogue) program implementation in order to improve public welfare. The article is examined using qualitative approach, and informants were determined using snowball sampling. Data were collected by observation, interview and documentation. Methods of data analysis were made through the collection of raw data, data transcript, coding, categorizing, conclusion drawing based on temporary data, triangulation and concluding the final data. Data validity used triangulation of sources. The analysis results showed that the implementation of “Dialog Solutif” program began in 2006, followed by MUSPIDA and communities throughout Jember District. One of the most frequent processes is planning on development applying Bottom up. Bottom up is a planning based on the needs, desires and problems faced by people together with SKPD (Local Government Unit) in order to establish a policy or decision-making and, in this case, SKPD also serves as a facilitator. The program aims to increase regional development and public welfare. In the program implementation, there are several barriers such as technical barriers, Political Barriers to unpunctual budget.

Keywords: Program Implementation, Dialog Solutif, Public Relations of Jember Government

PENDAHULUAN

Di era globalisasi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting

bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberi landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Secara normatif UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan Negara. Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk transparansi berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Sebagaimana diketahui, tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seperti tercantum dalam Pasal 3 UU KIP, antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan

suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaran negara yang baik yaitu Transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu Kabupaten yang telah menerapkan Undang-Undang keterbukaan publik adalah Kabupaten Jember. Implementasi dari Undang-Undang keterbukaan publik di Kabupaten Jember yang dikemas dalam program Dialog Solutif. Program tersebut bertujuan untuk serap aspirasi dari masyarakat guna menentukan kebijakan dan meningkatkan pembangunan khususnya di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaannya program dialog solutif mempunyai dua kegiatan yaitu kegiatan Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat. Kegiatan Bedah Potensi Desa mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertempat di Kecamatan Umbulsari. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jember, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang ditetapkan melalui SK Nomor : 188.4/3/SEKKAB/012/2006

Tentang Petugas Penyebar Luasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui Potret Membangun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama (Program Dialog solutif) Kabupaten Jember yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID yang terdiri dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Dalam pelaksanaan program dialog solutif melibatkan Polisi Resort (Polres), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komando Daerah Militer (Kodim), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), dan Instansi-istansi terkait, seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi Dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Dinas PU (Pekerjaan Umum) Cipta Karya, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga.

Pada program Dialog Solutif masyarakat dapat bertemu langsung dan berdialog dengan Bupati Jember, melalui kegiatan Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat yang dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat luas untuk mencari solusi atas apa yang terjadi di lingkungan masyarakat

Kabupaten Jember. Kegiatan Bedah Potensi Desa bersifat musyawarah dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sedangkan kegiatan temu karya rakyat untuk membahas keberhasilan kegiatan bedah potensi Desa dan pamong praja mengenai pembangunan Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam upaya menjalin komunikasi yang baik antara Bupati dan masyarakat Kabupaten Jember.

Dalam penyebarluasan informasi pemerintah Kabupaten Jember mengimplementasi dengan program dialog solutif untuk meningkatkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan konsep *bottom-up* yaitu Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam hal ini perencanaan memiliki peran sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan control adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Conyers (1992:154) menyebutkan terdapat tiga alasan utama

mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.

3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut „urun rembug“ (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

2.2 Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif adalah suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Rahim (2004), mengajukan empat konsep terkait komunikasi partisipatif akan mendorong terbangunnya pemberdayaan (*empowerment*) yaitu *heteroglasia*, *dialogis*, *poliponi* dan *karnaval*. Pertama, *Heteroglasia*: Konsep ini menunjukkan fakta bahwa sistem pembangunan selalu dilandasi oleh berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi satu sama lain. Kedua, *Dialog* adalah komunikasi transaksional dengan pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagai. Ketiga, *Poliponi* adalah bentuk tertinggi dari suatu dialog dimana suara-suara yang tidak menyatu atau terpisah dan meningkat menjadi terbuka, memperjelas satu sama lain, dan tidak menutupi satu sama lain. Keempat, *Karnaval*: Konsep ini bagi komunikasi pembangunan membawa semua varian dari semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, parody, dan

hiburan secara bersama-sama. Proses ini dilakukan dengan tidak formal dan biasa juga diselingi oleh humor dan canda tawa.

2.3 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pembangunan

Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprahnya pekerja sosial. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas yang biasa disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial yang di Indonesia dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Suharto (2005:4) menyatakan bahwa:

“Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Sehingga yang dimaksud dengan kesejahteraan

sosial dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat pada program Dialog Solutif untuk pembangunan daerah.

2.4 Implementasi Program

Parsons (2008:472), menjelaskan bahwa implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada digaris depan pemberi layanan. Sedangkan Meier dan Horn dalam Parsons (2008:482), menyatakan bahwa studi implementasi perlu mempertimbangkan isi (*content*) atau tipe kebijakan. Artinya bahwa dalam melaksanakan dan menjalankan implementasi suatu program kebijakan harus melihat dan memperhatikan agar sejalan dengan isi dari kebijakan suatu program.

Tahapan implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui tujuh langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan

menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahapan ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dimana menggambarkan secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dimana melakukan perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada suatu masalah tertentu.

5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada

pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.

7. Terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini mendasar pada hasil penelitian yang berfokus pada Implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi Deskriptif, Penentuan informan menggunakan *snowball Sampling*. Pengumpulan data menggunakan tiga teknik di antaranya: observasi, wawancara yang digunakan *In dept Interview*. Data dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman saat menggali informasi dengan informan. Kajian ini juga menggunakan teknik analisis data berbentuk taksonomi. Setelah data terkumpul, Teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Untuk teknik uji

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama, yang dikemas dalam Program Dialog Solutif dalam hal ini mempunyai dua kegiatan yaitu bedah potensi Desa dan temu karya rakyat dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan daerah. Kegiatan bedah potensi Desa dimulai pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertempat dikecamatan Umbulsari. Dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya. Dalam kegiatan bedah potensi Desa tersebut beberapa Desa dalam satu kecamatan berkumpul jadi satu untuk menyampaikan permasalahan yang ada di Desanya maupun memamerkan potensi-potensi yang ada di Desanya masing-masing. Untuk putaran terakhir dilaksanakan di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa pada tanggal 22 Juli 2008. Dilanjutkan dengan kegiatan Temu Karya Rakyat (TKR) pada tanggal 22 Maret 2009

yang dimulai dari Kecamatan Tanggul. Kegiatan Temu Karya Rakyat ini dilaksanakan 1 tahun 3 kali dengan gabungan 3 kecamatan. Temu karya rakyat pernah berhenti pada tahun 2011 dan mulai dilanjutkan lagi pada tahun 2012. Kegiatan tersebut menjadi media evaluasi bagi pembangunan di Kabupaten Jember yang mempertemukan Bupati, Pejabat Teras Pemkab dan masyarakat secara langsung. Untuk tahun 2013 -2014 kembali dilaksanakan kegiatan bedah potensi Desa dengan konsep kegiatan dilaksanakan gabungan tiga kecamatan. Pada Tahun 2015 ini akan dilakukan 3 priode dengan waktu 4 bulan sekali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan IT sebagai implementor program berikut:

“Ingin mempercepat proses penyerapan informasi ke masyarakat langsung, oleh bapak Bupati karena ingin mengetahui aspirasi tentang pembangunandaerah, mensinkronisasi informasi dari masyarakat dan jajaran pemerintah apakah benar informasi tersebut. Menyelaraskan informasi antara masyarakat dan pemerintah untuk pembanguna masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam arti pembanguna masyarakat”.(IT 03 Maret 2015)

Penjelasan informan IT di atas bahwa program Dialog Solutif ini untuk mempercepat proses penyerapan informasi kemasyarakat langsung oleh pak Bupati karena ingin mengetahui aspirasi tentang pembangunan daerah.

Dengan memahami model-model Implementasi pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model Implementasi dalam dua jenis pemilahan menurut Pulz dan Treib dalam Agung (2011:15) yaitu pertama adalah Implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*Top Down*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom up*), atau pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*). Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam Negara. Sebaliknya “*bottom up*“ bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah atau swasta, namun pelaksanaannya oleh rakyat atau target sasaran. Diantara dua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah (pembuat kebijakan) dan masyarakat (target sasaran). Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*).

Pendekatan perencanaan pembangunan *Bottom-Up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sedangkan pada posisi ini pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Ada empat tahap yang dilakukan implementor yaitu; tahap persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan terminasi yang dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. sehingga program dapat berjalan lancar dan tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai implementor program sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan program dialog solutif kita biasanya mempersiapkan

petugas dan mempersiapkan dilapangan. Untuk persiapan petugas biasa kita mengadakan rapat koordinasi bagian Humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Untuk persiapan lapangan yang dipersiapkan biasanya itu lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program”. (ZA Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan informan ZA diatas bahwa persiapan pelaksanaan program dialog solutif ini meliputi persiapan petugas dan persiapan di lapangan. Untuk persiapan petugas yaitu dilakukannya rapat koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Sedangkan persiapan lapangan yaitu penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program. Supaya pelaksanaan program bisa berjalan lancar karena dalam pelaksanaan program ini diikuti oleh masyarakat dan SKPD di Kabupaten Jember.

Persiapan Program menurut menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) bahwa Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. Tahap persiapan meliputi persiapan petugas yaitu

rapat koordinasi bagian Humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program sedangkan persiapan dilapangan yaitu penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program.

4.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan program Dialog Solutif dilaksanakan mulai pada tahun 2006 yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh Muspida dan masyarakat se-Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan pembangunan, seperti yang diungkapkan oleh informan ZA implementor program sebagai berikut:

“Sejauh ini pelaksanaan program Dialog Solutif berjalan mulai 2006 sampai 2014 dan tahun 2015 ini insyallah masih akan dilaksanakan 3 priode 4 bulan sekali”. (ZA Maret 2015)

Berdasarkan infoman ZA diatas menjelaskan bahwa pelaksana program dialog solutif dimulai pada tahun 2006 sampai tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 ini akan dilakukan 3 priode yang dilaksanakan 4 bulan sekali. Pelaksanaan program Dialog Solutif ini untuk mempercepat pelaksanaan proses pembangunan daerah.

Menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) dibahwa Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Program Dialog Solutif ini mengusung dua tema kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat.

Setiap bulan Bupati Jember berkeliling ke seluruh penjuru Kab. Jember untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Berbagai keinginan, harapan, saran dan usulan disampaikan melalui forum Bedah potensi Desa. Dialog Solutif Bedah Potensi Desa, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan demi membuka komunikasi secara intim dengan masyarakat

Temu Karya Rakyat merupakan kegiatan lanjutan dari Bedah Potensi Desa. Yang membedakan kegiatan Bedah Potensi Desa dengan Temu Karya Rakyat adalah jika dalam Bedah Potensi Desa masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya dan dalam kegiatan tersebut Bupati berperan sebagai narasumber bersama para Kepala SKPD, sedangkan pada Temu Karya Rakyat Bupati berperan sebagai moderator sedangkan para kepala SKPD

menjadi narasumber yang menjelaskan hasil kerja berdasarkan aspirasi yang telah diungkapkan masyarakat pada saat kegiatan Bedah Potensi Desa.

4.1.3 Evaluasi

Evaluasi program Dialog Solutif ini dilakukan setelah pelaksanaan program. Untuk evaluasi pelaksanaan program Dialog Solutif dilakukan oleh bagian Humas (Hubungan Masyarakat) Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan untuk evaluasi dari usulan dari masyarakat langsung dilakukan oleh instansi-instansi masing-masing.

Menurut (Yusuf, 2000 : 3) Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Evaluasi program yang dilakukan Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi kegiatan dilakukan oleh masing-masing instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dialog solutif.

4.1.4 Terminasi

Terminasi adalah tahapan tindak lanjut yang merupakan akhir dari suatu kegiatan dan relasi perubahan. Untuk terminasi

pelaksanaan program Dialog Solutif masih belum ada karena program ini masih berlangsung dan berjalan sampai sekarang sehingga terminasi untuk program ini belum dilakukan. Untuk terminasi program dilakukan oleh Bagian Humas. Untuk terminasi program adalah terminasi pelaksanaan program, sedangkan terminasi kegiatan dilakukan oleh Instansi-instansi yang ikut dalam pelaksanaan program Dialog Solutif terminasi kegiatan yaitu menindak lanjuti usulan dari masyarakat pada waktu pelaksanaan program Dialog Solutif.

Soenarko (2000) terkait pada tahapan terminasi, dimana akhir dari suatu relasi perubahan dan dapat terjadi Karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri.

4.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Program Dialog Solutif

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dari pelaksanaan program dialog solutif. Faktor tersebut dapat dideskripsikan dalam sub bab dibawah ini;

4.2.1 Faktor pendorong

Pelaksanaan program dialog solutif ini sangat didukung oleh pihak Kabupaten Jember karena tujuan program dialog solutif ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program dialog solutif ini melibatkan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), untuk sinergitas antara lembaga pemerintah atau SKPD ini pihak humas sebelum pelaksanaan program dialog solutif ini mengadakan rapat dengan SKPD-SKPD terkait supaya pelaksanaan program Dialog Solutif berjalan lancar.

Partisipasi masyarakat yaitu dukungan dari masyarakat untuk tidak hanya hadir di program dialog solutif tetapi juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan program pembangunan. Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berjalanya program dialog solutif ini karena adanya partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi dalam kegiatan dialog solutif ini diantaranya penyampaian aspirasi.

Program dialog solutif ini tergantung dengan anggaran dana jika anggaran dana turunnya tepat waktu maka pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan.

4.2.2 Faktor Penghambat

Hambatan teknis yang terjadi pada pelaksanaan program Dialog Solutif. Dalam

pelaksanaan Program Dialog Solutif terdapat juga hambatan yang bersifat politis. Pelaksanaan program Dialog Solutif bisa terhambat karena anggaran yang dianggarkan pemerintah bagian Humas Pemda Jember belum turun.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan diatas bahwa hambatan pada waktu pelaksanaan program Dialog Solutif adalah hambatan teknis yaitu hambatan pada waktu pelaksanaan program Dialog Solutif, hambatan politis yaitu dengan adanya kegiatan yang bernuansa politik seperti pemilihan DPR, dan anggaran yang turun tidak tepat waktu yaitu anggaran yang turunnya tidak pasti sedangkan tanggal kegiatan sudah ditentukan jadi dengan terlambatnya turunnya anggaran secara langsung akan menghambat pelaksanaan program Dialog Solutif.

4.3 Dampak Pelaksanaan Program Dialog Solutif

Program Dialog Solutif ini untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Pelaksanaan program Dialog Solutif ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk kebutuhan pembanguna yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan program pembangunan pada tahun berikutnya dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Dialog Solutif menjadi salah satu program pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ini berupa serap aspirasi, untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana masyarakat. Dengan harapan jika pemerintah Kabupaten Jember mengetahui secara jelas kondisi di masyarakat akan dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember. Misalnya pembangunan sarana prasarana yang telah dilakukan dikecamatan Ambulu. Berupa pembangunan jembatan dan pengerukan Dam yang merupakan hasil dari kegiatan Bedah Potensi Desa yang merupakan kegiatan bagian dari Program Dialog Solutif yang dilaksanakan pada tanggal 09-03 2008 yang bertempat di Desa Tegalsari.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi program Dialog Solutif yang mempunyai dua kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat. Kegiatan bedah potensi desa dimulai pada tahun 2006 yang diawali dari Kecamatan Umbulsari dan kegiatan temu karya rakyat dimulai pada tahun 2009 yang diawali dari Kecamatan Tanggul. Untuk melihat dari implementasi program ini, adapun tahapan

yang dimulai dari tahap persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Terminasi yang disimpulkan sebagai berikut;

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. sehingga program dapat berjalan lancar dan tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai maksimal. Tahap persiapan meliputi persiapan petugas dan persiapan dilapangan. Sedangkan pelaksanaan program Dialog Solutif dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan temu karya rakyat. Untuk evaluasi program dilakukan oleh Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi kegiatan di lakukan oleh instansi-instansi atau dinas-dinas masing-masing. Dan terminasi pelaksanaan program dilakukan oleh bagian Humas Pemda Jember sedangkan terminasi kegiatan dilaksanakan oleh instansi-instansi dan dinas-dinas yang terkait.

Dampak dari pelaksanaan program dialog solutif ini adalah dapat dijadikan pedoman dalam mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan untuk pembangunan Desa dan bisa menampung keinginan-keinginan yang diinginkan oleh masyarakat.

Program dialog solutif ini untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. terjaringnya aspirasi masyarakat untuk

kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan program pembangunan pada tahun berikutnya. Dampak pembangunan infra struktur dan sarana prasarana dari aspirasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta

Bagian humas kabupaten jember ,2013, *pedoman pelaksanaan PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berserta dasar-dasar hukum*

Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Internet

<http://www.keterbukaaninformasi.com> , diakses pada tanggal 28 september 2014

<http://www.ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 30 september 2014

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia.2008. *Undang undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang kererbukaan informasi publik* . Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah republik Indonesia . 2010 . *nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

